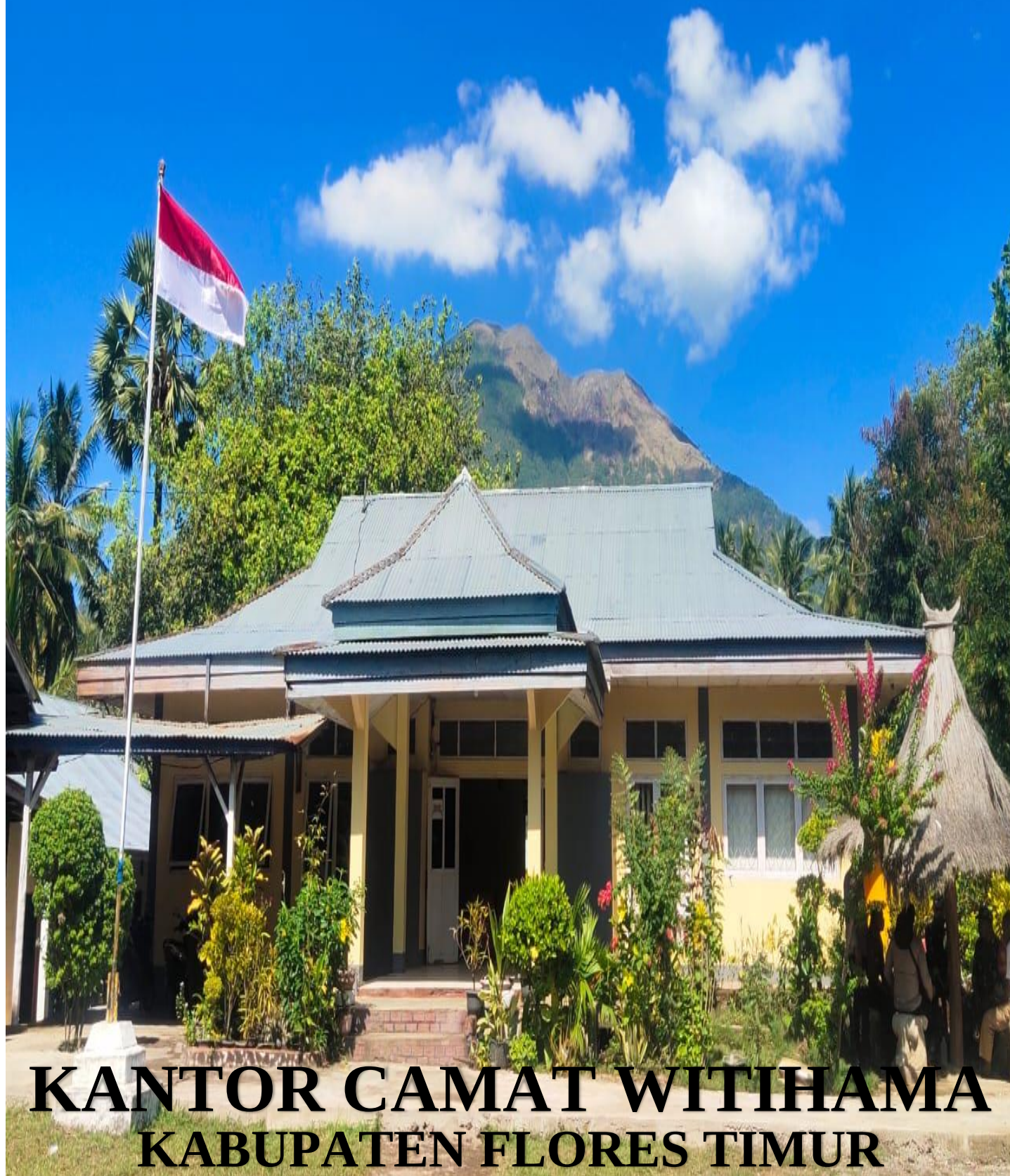




LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023



**KANTOR CAMAT WITIHAMAS
KABUPATEN FLORES TIMUR**



KATA PENGANTAR

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 Tanggal 29 September, maka pelaksanaannya sampai dengan 31 Desember 2023 masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pengelola Keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur selaku Entitas Akuntansi wajib menyusun Laporan Keuangan TA. 2023 dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan aturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Kantor Camat Witihamu Kabupaten Flores Timur terdiri dari 5 (lima) laporan, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian pengantar yang disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing dan menyertai kita dalam tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Witihamu, Januari 2024
Camat Witihamu,

LAURENSIUS LEBU RAYA, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19660810 200012 1 003



DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Sistematika	5
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	6
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	6
2.2. Pendapatan	6
2.3. Belanja	7
2.4. Hambatan dan Kendala	9
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	10
3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	10
3.2. Basis Akuntansi	10
3.3. Basis Pengukuran Penyusunan Laporan Keuangan	10
3.3.1. Kas	10
3.3.2. Persediaan	11
3.3.3. Investasi Jangka Panjang	13
3.3.4. Asset Tetap	13
3.3.5. Asset Lainnya	19
3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi dalam SAP	19
BAB IV PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN	20
4.1. Laporan Realisasi Anggaran	20
4.1.1. Pendapatan – LRA	20
4.1.2. Belanja	20
4.1.2.1. Belanja Operasi	21
4.1.2.1.1. Belanja Pegawai	21



4.1.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	23
4.1.2.1.3.	Belanja Hibah	25
4.1.2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	25
4.1.2.2.	Belanja Modal	25
4.1.2.2.1.	Belanja Modal Tanah	26
4.1.2.2.2.	Belanja Peralatan dan mesin	26
4.1.2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	26
4.1.2.2.4.	Belanja Aset Tetap Lainnya	26
4.1.2.3.	Surplus / (Defisit)	27
4.1.2.4.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	27
4.2.	Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Neraca	27
4.2.1.	Asset	27
4.2.1.1.	Asset Lancar	27
4.2.1.1.1.	Kas di Kas Daerah	28
4.2.1.1.2.	Piutang Lainnya	28
4.2.1.1.3.	Persediaan	28
4.2.1.2.	Investasi Jangka Panjang	28
4.2.1.2.1.	Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) ...	28
4.2.1.3.	Aset Tetap	28
4.2.1.3.1.	Tanah	29
4.2.1.3.2.	Peralatan dan Mesin	30
4.2.1.3.3.	Gedung dan Bangunan	32
4.2.1.3.4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	33
4.2.1.3.5.	Aset Tetap lainnya	34
4.2.1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	34
4.2.1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	34
4.2.2.	Dana Cadangan	35
4.2.3.	Aset Lainnya	35
4.2.4.	Kewajiban	35
4.2.4.1.	Kewajiban Jangka Pendek	35
4.2.4.2.	Kewajiban jangka Panjang	36



4.2.5.	Ekuitas	36
4.3.	Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Operasional (LO)	36
4.3.1.	Pendapatan LO	36
4.3.2.	Beban LO	36
4.3.2.1.	Beban Pegawai – LO	37
4.3.2.1.1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	37
4.3.2.1.2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	38
4.3.2.1.3.	Beban Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya	38
4.3.2.2.	Beban Barang dan Jasa	39
4.3.2.2.1.	Beban Barang	39
4.3.2.2.2.	Beban Jasa	40
4.3.2.2.3.	Beban Pemeliharaan	40
4.3.2.2.4.	Beban Perjalanan Dinas	41
4.3.2.2.5.	Beban Barang yang Diserahkan	42
4.3.2.3.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	42
4.3.3.	Surplus/ Defisit Operasional	42
4.3.4.	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	42
4.3.5.	Pos Luar Biasa	43
4.3.6.	Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa	43
4.3.7.	Surplus/ Defisit LO	43
4.4.	Penjelasan atas Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
4.4.1.	Ekuitas Akhir	43
4.4.2.	Surplus/ Defisit LO	44
BAB V INFORMASI NON KEUANGAN		45
BAB VI PENUTUP		47
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Table 2.1. Belanja	7
Table 2.2. Realisasi Kinerja	9
Table 3.1. Komponen Biaya Perolehan	18
Table 4.1. Rincian Belanja Pegawai	21
Tabel 4.2. Rincian Belanja Barang dan Jasa	23
Table 4.3. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin	26
Tabel 4.4. Aset Lancar	29
Table 4.5. Rincian Aset Tetap Tanah	29
Table 4.6. Mutasi Aset Tanah	29
Table 4.7. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	30
Table 4.8. Mutasi Aset tetap perlatan dan Mesin	31
Table 4.9. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	32
Table 4.10. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	33
Table 4.11. Akumulasi Penyusutan	34
Table 4.12. Beban gaji dan Tunjangan ASN	37
Table 4.13. Beban Tambahan Penghasilan ASN	38
Table 4.14. Beban Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya	39
Table 4.15. Beban Barang	39
Table 4.16. Beban Jasa	40
Tebel 4.17 Beban Pemeliharaan	41
Table 4.18. Beban Perjalanan Dinas	41
Table 4.19. Beban Penyusutan Perlatan dan Mesin	44
Table 4.20. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	45
Table 5.1. Data Pegawaian Berdasarkan Eselonering	45
Table 5.2. Data Pegawaian Berdasarkan Golongan	46
Tabel 5.3. Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Camat Witihama Kabupaten Flores Timur sebagai Organisasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan di Kantor Camat Witihama Kabupaten Flores Timur selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kantor Camat Witihama untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparasi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Kantor Camat Witihama Tahun Anggaran 2023 adalah :

- a. Menyediakan informasi mengenai anggaran penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Kantor Camat Witihama;



- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kantor Camat Witihama sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kantor Camat Witihama sebagai entitas akuntansi dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kantor Camat Witihama apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Witihama Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)



sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)



- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tanggal 29 Desember tentang APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 Tanggal 29 September;
- n. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- o. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;



1.3. Sistematika

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan sesuai dengan SAP, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Witihama Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab III Kebijakan Akuntansi

- 3.1 Entitas Pelaporan
- 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 4.1 Laporan Realisasi Anggaran -LRA SKPD
- 4.2 Laporan Neraca SKPD
- 4.3 Laporan Operasional – LO SKPD
- 4.4 Laporan Perubahan Ekuitas – LPE SKPD
- 4.5 Catatan atas Laporan Keuangan -CaLK SKPD

Bab V Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VI Penutup



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD TA 2023.

2.2. Pendapatan

Kantor Camat Witihamas Kabupaten Flores Timur Bukan Organisasi Perangkat Daerah Yang melaksanakan Penerimaan dan Penatausahaan Penerimaan daerah. Maka dari itu tidak menganggarkan anggaran Pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2023.



2.3. Belanja

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Kantor Camat Witihama Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Belanja

KODE PROG. KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	SISA ANGGARAN 2023
7.01	KECAMATAN	1.607.388.044	1.513.765.585	94,18	180.657.290
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.500.628.594	1.323.028.604	88,16	177.599.990
7.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	38.997.528	38.962.350	99,91	35.178
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	11.978.750	99,82	21.250
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.999.650	7.990.000	99,88	9.650
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.999.600	12.998.600	99,99	1.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.998.278	5.995.000	99,95	3.278
7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.288.537.177	1.117.678.024	286	170.859.153
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.246.537.427	1.075.680.924	86,29	170.856.503
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.999.875	29.999.500	100,00	375
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.999.875	11.997.600	99,98	2.275
7.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	88.994.279	88.984.440	99,99	9.839
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.496.291	1.496.000	99,98	291
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000	12.000.000	100,00	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.998.400	3.990.000	99,79	8.400
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.980	19.998.940	99,99	1.040
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000	13.500.000	100,00	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.999.608	37.999.500	100,00	108
7.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	9.999.710	9.999.400	100	310
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.999.710	9.999.400	100,00	310



7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.900.000	55.050.000	91,90	4.850.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000	4.450.000	98,89	50.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.400.000	49.600.000	91,18	4.800.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.199.900	12.354.390	87,00	1.845.510
7.01.01.2.09.02	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.200.000	2.354.890	56,07	1.845.110
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	9.999.900	9.999.500	100,00	400
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.999.450	27.997.400	99,99	2.050
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	27.999.450	27.997.400	99,99	2.050
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.999.450	27.997.400	99,99	2.050
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.760.000	38.760.000	100,00	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.760.000	38.760.000	100,00	0
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	38.760.000	38.760.000	100,00	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	40.000.000	36.944.750	92,36	3.055.250
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.000.000	36.944.750	92,36	3.055.250
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.000.000	20.000.000	100,00	0
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20.000.000	16.944.750	84,72	3.055.250

Dari table diatas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran pada Kantor Camat Wihama Tahun Anggaran 2023 tergolong baik yaitu sebesar 94,18 %.



Realisasi kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan pada Kantor Camat Witiama adalah sbb:

Tabel 2.2. Realisasi Kinerja

Sasaran	Uraian Program	Capaian Realisasi Keuangan (%)
Sasaran 1 : Terwujudnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran yang Memadai dan Berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	88,16
Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	99,99
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00
Sasaran 3 : Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	92,36

2.4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja keuangan

Pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan pada program-program yang telah direncanakan tidak mempunyai hambatan berarti, ini terlihat dari realisasi secara umum dan menyeluruh mencapai 94,18% dengan realisasi belanja daerah sebesar 100 %. Namun Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai, oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenal adanya dua entitas yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Karena merupakan suatu entitas Akuntansi maka pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan, yang akan disampaikan secara berjenjang kepada Bupati dalam hal ini bagian Keuangan dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dasar akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah dengan Basis Kas atau pengakuan penerimaan dan pengeluaran diakui pada saat terjadi penerimaan atau pengeluaran Kas. Sehingga dasar dalam penyusunan laporan adalah dari Surat Pertanggung jawaban yang telah disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh PPK SKPD. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan kantor Camat Witihama adalah sebagai berikut.

3.3.1 Kas

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2023.



Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang kertas, uang logam dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran/pemegang kas per tanggal 31 Desember 2023. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

3.3.2 Persediaan

- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa :
 - (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 1) Pengakuan Persediaan
 - a) Persediaan diakui :
 - (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
 - a) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- 1) Pengukuran Persediaan



- a) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barangbarang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
- b) Persediaan disajikan sebesar :
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
 - (4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
 - a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
 - b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan :



- (1) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (2) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3.3.3 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen.

3.3.4 Aset Tetap

Definisi Aset Tetap

- a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.



- c) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e) Masa manfaat adalah :
 - (1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - (2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- h) Klasifikasi Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- j) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak mudah rusak dan dalam kondisi siap pakai.



- k) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- l) Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut :
 - (1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - (4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- m) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- n) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
- o) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
 - 1) Pengakuan Aset Tetap
 - a) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
 - b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :



- (1) Berwujud;
 - (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (3) Tidak mudah rusak;
 - (4) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (5) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (6) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - (7) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- c) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- d) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- e) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah dikuasai, diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 1) Pengukuran Aset Tetap
- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
 - b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



- c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.



Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, serta biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.



3.3.5 Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

- (1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- (2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- (4) Aset Tidak Berwujud;
- (5) Aset Lain-lain;

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi patokan pengklasifikasian dan kode belanja pada saldo awal Tahun Anggaran 2023.



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Witihama Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Pendapatan	<u>Anggaran TA 2023</u> Rp -	<u>Realisasi TA 2023</u> Rp -
Belanja	<u>Anggaran TA 2023</u> Rp 1.607.388.044,00	<u>Realisasi TA 2023</u> Rp 1.513.765.585,00

Penjelasan masing masing pos Realisasi Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut :

4.1.1 PENDAPATAN-LRA

<u>31 Desember 2023</u> Rp -	<u>31 Desember 2022</u> Rp -
--	--

Kantor Camat Witihama Bukan Merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan penerimaan daerah maka dari itu tidak memiliki Pos pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.

4.1.2. BELANJA

<u>31 Desember 2023</u> Rp 1.513.765.585,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp 1.658.100.415,00
---	---

Belanja Kantor Camat Witihama untuk Tahun 2023 yang berakhir 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp.1.513.765.585,00 dari anggaran sebesar Rp.1.607.388.044,00 atau terealisasi 94,18%, yang terdiri dari:



4.1.2.1. BELANJA OPERASI

31 Desember 2023
Rp 1.491.939.685,00

31 Desember 2022
Rp 1.658.100.415,00

Belanja Operasi untuk Tahun 2023 yang berakhir 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp 1.491.939.685,00 dari anggaran sebesar Rp 1.585.562.144,00 atau terealisasi sebesar 94,10 % dengan rincian sebagai berikut :

4.1.2.1.1. Belanja Pegawai

31 Desember 2023
Rp 1.188.155.755,00

31 Desember 2022
Rp.1.221.240.915,00

Belanja pegawai per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp1.188.155.755,00 dari anggaran sebesar Rp 1,273.537.427,00 atau terealisasi sebesar 93,29% dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Rincian Belanja Pegawai

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01	Belanja Pegawai	1.273.537.427	1.188.115.755	93,29	1.221.240.915
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.069.817.976	989.476.313	92,49	1.012.423.595
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	822.868.870	770.601.804	93,65	778.208.700
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	789.666.360	764.668.804,00	96,83	778.208.700,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	33.202.510	5.933.000,00	17,87	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	78.951.980	73.304.940	92,85	84.029.792
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	74.303.600	73.304.940,00	98,66	84.029.792,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.648.380	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	84.912.100	74.940.000,00	88,26	76.020.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	84.912.100	74.940.000,00	88,26	76.020.000,00



Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
KANTOR CAMAT WITIHAMA
Periode 31 Desember 2023

5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.273.500	1.064.000,00	24,90	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.273.500	1.064.000,00	24,90	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.711.120	18.710.000,00	90,34	20.660.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.522.880	18.710.000,00	91,17	20.660.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	188.240	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	57.378.680	50.259.480,00	87,59	53.228.700,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	54.136.320	50.114.640,00	92,57	53.228.700,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.242.360	144.840,00	4,47	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	700.466	585.065,00	83,53	268.855,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	644.476	585.065,00	90,78	268.855,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	55.990	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21260	11.024,00	51,85	7.548,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.160	10.872,00	53,93	7.548,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.100	152,00	13,82	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	176.719.451	171.639.442,00	97,13	185.417.320,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	70.687.763	68.655.760,00	97,13	78.112.494,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	70.687.763	68.655.760,00	97,13	78.112.494,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0	0,00	0,00	600.840,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0	0,00	0,00	600.840,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	106.031.688	102.983.682,00	97,13	106.703.986,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	106.031.688	102.983.682,00	97,13	106.703.986,00



5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	27.000.000	27.000.000,00	100,00	23.400.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	27.000.000	27.000.000,00	100,00	23.400.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	27.000.000	27.000.000,00	100,00	23.400.000,00

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi belanja pegawai untuk Tahun 2023 yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan/ **penurunan** sebesar 2,79 % atau sebesar, Rp 33.125.160,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

4.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2023
Rp 303.823.930,00

31 Desember 2022
Rp 436.859.500,00

Belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 303.823.930,00 dari anggaran sebesar Rp 312.024.717,00 atau terealisasi sebesar 97,37 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Rincian Belanja Barang Dan Jasa

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.024.717	303.823.930,00	97,37	436.859.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang	85.742.217	85.726.540,00	99,98	102.035.760,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	85.742.217	85.726.540,00	99,98	102.035.760,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.825.400	5.825.000,00	99,99	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.468.400	5.460.000,00	99,85	3.567.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.226.046	15.223.500,00	99,98	21.544.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.868.580	22.867.540,00	100,00	17.115.860,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.357.500	2.354.500,00	99,87	5.225.000,00



Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
KANTOR CAMAT WITIHAMA
Periode 31 Desember 2023

5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.496.291	1.496.000,00	99,98	2.996.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	4.106.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.500.000	27.500.000,00	100,00	43.480.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.000.000	4.000.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	143.593.000	135.412.890,00	94,30	207.088.740,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	143.593.000	135.412.890,00	94,30	207.088.740,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	56.660.000	53.610.000,00	94,62	56.920.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	54.400.000	51.200.000,00	94,12	124.800.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	480.000	480.000,00	100,00	960.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.600.000	2.550.000,00	98,08	3.060.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.140.000	2.140.000,00	100,00	4.550.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.700.000	854.890,00	31,66	1.920.740,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	24.613.000	24.578.000,00	99,86	14.878.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.174.500	4.174.500,00	100,00	14.420.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	5.425.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	0,00	0,00	2.500.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0	0,00	0,00	375.000,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0	0,00	0,00	2.100.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0	0,00	0,00	450.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.174.500	4.174.500,00	100,00	8.995.000,00



5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.174.500	4.174.500,00	100,00	8.995.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.515.000	78.510.000,00	99,99	113.315.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.515.000	78.510.000,00	99,99	113.315.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.515.000	78.510.000,00	99,99	113.315.000,00

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 mengalami kenaikan/ **penurunan** sebesar 43,79 % atau sebesar Rp.133.035.570,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

4.1.2.1.3. Belanja Hibah

31 Desember 2023
Rp 0,00

31 Desember 2022
Rp 0,00

Kantor Camat Witehama, pada Tahun 2023 tidak memiliki Anggaran dan Realisasi untuk Belanja Hibah.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

30 Desember 2023
Rp 0,00

31 Desember 2022
Rp 0,00

Kantor Camat Witehama, pada Tahun 2023 tidak memiliki Anggaran dan Realisasi untuk Belanja Bantuan Sosial.

4.1.2.2. BELANJA MODAL

31 Desember 2023
Rp 21.825.900,00

31 Desember 2022
Rp 0,00

Belanja Modal untuk Tahun 2023 yang berakhir 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp 21.825.900,00 dari anggaran sebesar Rp 21,825,900,00 atau terealisasi sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut.



4.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Kantor Camat Witihama, pada Tahun 2023 tidak mengagarkan Anggaran dan Realisasi untuk Belanja Modal Tanah.

4.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 21.825.900,00	Rp 0,00

Realisasi untuk Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2023 yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami **kenaikan**/ penurunan sebesar 100 % atau sebesar, Rp.21.825.900,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

4.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Kantor Camat Witihama, pada Tahun 2023 tidak menganggarkan Anggaran dan Realisasi untuk Belanja Modal untuk Gedung dan Bangunan.

4.1.2.2.4. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Kantor Camat Witihama, pada Tahun 2023 tidak menganggarkan Anggaran dan Realisasi untuk Belanja Modal untuk Jalan Irigasi dan Jaringan.

4.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Kantor Camat Witihama, pada Tahun 2023 tidak menganggarkan Anggaran dan Realisasi untuk Belanja Modal asset Tetap lainnya.



4.1.2.3. SURPLUS / (DEFISIT)

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp (1.513.765.585,00)	Rp (1.658.100.415,00)

Jumlah sebesar Rp. (1.513.765.585,00) adalah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Camat Witihama untuk Tahun 2023 yang berakhir 31 Desember 2023. Jumlah tersebut merupakan selisih antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.0,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.513.765.585,00.

4.1.3.4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp (1.513.765.585,00)	Rp. Rp (1.658.100.415,00)

Silpa untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp. (1.513.765.585,00) apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. (1.658.100.415,00) maka mengalami kenaikan/ **penurunan** sebesar Rp. (144.334.830) atau (9,53)%

4.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Kantor Camat Witihama yang menggambarkan Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan lebih lanjut sebagai berikut.

4.2.1. ASET

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp. 415.988.920,00	Rp. 461.378.400,00

Saldo Aset Kantor Camat Witihama per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 415,988,920,00

4.2.1.1. ASET LANCAR

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp. 0,00	Rp. 0.00

Saldo Aset Lancar Kantor Camat Witihama per 31 Desember 2023 tercatat Rp0,00 yang meliputi kas di kas daerah, piutang dan Persediaan.



4.2.1.1.1. Kas di Kas Daerah

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp. 0,00	Rp. 0,00

Saldo per 31 Desember 2023 kas di Kas Daerah adalah Rp. 0,00

4.2.1.1.8. Piutang Lainnya

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Saldo per 31 Desember 2023 Piutang Lainnya adalah Rp. 0,00

5.2.1.1.12. Persediaan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp. 0,00	Rp.0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 yakni meliputi persediaan (Alat Tulis Kantor Rp 0,00 dan Alat dan Bahan Untuk Kelengkapan Kantor Rp 0,00).

4.2.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

4.2.1.2.1 Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir)

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

4.2.1.3. ASET TETAP

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp. 414.988.920,00	Rp 461,378,400,00

Saldo asset Tetap Kantor Camat Witihamas per 31 Desember 2023 tercatat Rp 414,988,920,00 Penjelasan lebih lanjut dari perolehan masing-masing kelompok aset tetap, sebagai berikut.



4.2.1.3.1. Tanah

31 Desember 2023
Rp. 38.760.000,00

31 Desember 2022
Rp. 38.760.000,00

Saldo aset Tetap – Tanah Kantor Camat Witihama per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.38.760.000,00 dan Rp. 38.760.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5 Rincian aset tetap Tanah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan
1.3.01	Tanah	38.760.000,00	38.760.000,00	-
1.3.01.01	Tanah	38.760.000,00	38.760.000,00	-
1.3.01.01.01	Tanah Persil	38.760.000,00	38.760.000,00	-

Mutasi aset tetap tanah dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.6. Mutasi aset Tanah

Tanah	Penambahan	Pengurang	Kenaikan/ Penurunan
Saldo Awal	38.760.000,00		
Realisasi Belanja Modal/Pembelian	-		-
Kepitalisasi Belanja Barang dan Jasa			-
Ekstrakompable			-
Pindah Antar Aset			-
Pindah Antar Entitas			-
Hibah			-
Hasil Sensus			-
Tindak Lanjut LHP			-
Reklas Dari Ekstrakompable (TLHP)			-
Reklas Ke aset Lain-lain			-
Persediaan			-
Jumlah	-	-	-
Mutasi +/-	-		
Saldo Akhir	38.760.000,00		



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Aset Tetap Tanah tidak mengalami mutasi penambahan atau pengurangan. kondisi ini memperlihatkan saldo Aset tetap tanah tahun 2023 dan 2022 tetap yakni senilai Rp. 38,760.000,00

4.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023
Rp. 549.032.900,00

31 Desember 2022
Rp. 545.207.000,00

Saldo asset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar tercatat Rp 549,032,900,00 dan Rp. 545,207,000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.7. Rincian asset tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan
1.3.2	Peralatan dan Mesin	549.032.900	545.207.000	3.825.900
1.3.2.05.002.001	Meubelair	58.500.000	58.500.000	0
1.3.2.02.002.004	Kendaraan Bermotor beroda dua	162.512.000	180.512.000	- 18.000.000
1.3.2.05.001.004	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	25.000.000	10.500.000	14.500.000
1.3.2.05.002.004	Alat Pendingin	3.500.000	3.500.000	0
1.3.2.05.003.001	Meja rapat penjabat	1.500.000	1.500.000	0
1.3.2.05.003.003	Kursi kerja penjabat	2.800.000	2.800.000	0
1.3.2.03.003.010	Alat Pembersih	0	2.500.000	-2.500.000
1.3.2.03.003.011	Kursi Tamu di ruangan pejabat	12.325.000	12.325.000	0
1.3.2.05.002.006	Alat rumah tangga lainnya (Home Use)	13.200.000	13.200.000	0
1.3.2.02.001.001	Kendaraan Dinas bermotor perorangan	0	0	0
1.3.2.10.001.002	Personal Komputer	101.562.500	92.690.000	8.872.500
1.3.2.10.002.003	Peralatan Personal Komputer	5.583.400	4.630.000	953.400
1.3.2.05.001.005	Alat Kantor Lainnya	7.500.000	7.500.000	0
1.3.2.03.001.004	Perkakas Bengkel Service	0	0	0
1.3.2.03.002.001	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	0	0	0
1.3.2.03.003.008	Alat Pengukur Waktu	0	0	0
1.3.2.03.003.009	Alat ukur lain-lain	0	0	0
1.3.2.03.003.014	Alat Dapur	5.050.000	5.050.000	0
1.3.2.02.001.006	Kendaraan Bermotor Khusus	150.000.000	150.000.000	0
1.3.2.03.002.007	Perkakas Bengkel Kerja	0	0	0



Mutasi asset tetap Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.8 Mutasi asset tetap Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	Penambahan	Pengurang	Kenaikan/ Penurunan
Saldo Awal	791.311.000		
Realisasi Belanja Modal/Pembelian	24.325.900		24.325.900,00
Kepitalisasi Belanja Barang dan Jasa			-
Ekstrakompatable			-
Pindah Antar Aset			-
Pindah Antar Entitas			-
Hibah			-
Hasil Sensus			-
Tindak Lanjut LHP			-
Reklas Dari Ekstrakompatable(TLHP)			-
Reklas Ke aset Lain-lain			-
Persediaan			-
Jumlah	24.325.900,00	-	24.325.900,00
Mutasi +/-	24.325.900,00		
Saldo Akhir	815.636.900,00		

Dari tabel diatas menunjukan bahwa mutasi peralatan dan Mesin tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.325.900,00 yang bersumber dari Reaslisasi Belanja Modal Tahun 2023.



4.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023
Rp. 497.700.000,00

31 Desember 2022
Rp. 497.700.000,00

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing tercatat sebesar Rp. 497.700.000,00 dan Rp. 497.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.9. Rincian Aset tetap Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan
1.3.3	Gedung dan Bangunan	497.700.000,00	497.700.000,00	-
1.3.03.01	Bangunan Gedung	497.700.000,00	497.700.000,00	-
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Kantor	306.000.000,00	306.000.000,00	-
1.3.03.01.12	Rumah Negara Golongan I	84.700.000,00	84.700.000,00	-
1.3.03.01.14	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	107.000.000,00	107.000.000,00	-
1.3.03.01.37	Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-
	Lainnya	-	-	-

Dari tabel diatas menunjukkan tidak ada kenaikan ataupun penurunan nilai Aset Tetap gedung dan Bangunan dari tahun 2023 dan 2022.



Mutasi Aset tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	Penambahan	Pengurang	Kenaikan/ Penurunan
Saldo Awal	499.300.000,00		
Realisasi Belanja Modal/Pembelian	-		-
Kepitalisasi Belanja Barang dan Jasa			-
Ekstrakompable			-
Pindah Antar Aset			-
Pindah Antar Entitas			-
Hibah			-
Hasil Sensus			-
Tindak Lanjut LHP			-
Reklas Dari Ekstrakompable (TLHP)			-
Reklas Ke aset Lain-lain			-
Persediaan			-
Jumlah	-	-	-
Mutasi +/-	-		
Saldo Akhir	499.300.000,00		

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Aset Tetap Gedung dan Bangunan tidak mengalami mutasi penambahan atau pengurangan. kondisi ini memperlihatkan saldo Aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023 dan 2022 tetap yakni senilai Rp. 499.300.000,00

4.2.1.3.4. Jalan Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2023
Rp.519.900.000,00

31 Desember 2022
Rp.519.900.000,00

Saldo asset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan TA. 2022 masing-masing sebesar Rp.519.900.000,00 dan Rp. 519.900.000,00



4.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023
Rp.0,00

31 Desember 2022
Rp. 0,00

Saldo aset Tetap – Aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp tercatat Rp.0,00 dan Rp.0,00.

4.2.1.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2023
Rp. 0,00

31 Desember 2022
Rp.0,00

Saldo aset Tetap – Kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

4.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2023
Rp. (1.190.403.980,00)

31 Desember 2022
Rp. (1.140.188.600,00)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.1.190.403.980,00 dan Rp.1.140.188.600,00 perbandingan komparatif akumulasi penyusutan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.11 Akumulasi Penyusutan

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan
1.3.	Akumulasi Penyusutan	1.190.403.980,00	1.140.188.600,00	50.215.380
1.3.2	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	485.635.980,00	475.454.600,00	10.181.380,00
1.3.3	Akumulasi Penyusutan Bangunan dan Gedung	214.948.000,00	204.994.000,00	9.954.000,00
1.3.4	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi	459.740.000,00	489.820.000,00	30.080.000,00

Dari tabel di atas menunjukan kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp 50.215.380,00 yang meliputi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 10.181.380,00 , Akumulasi



Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.9.954.000,00 dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.30.080.000,00.

4.2.2. DANA CADANGAN

31 Desember 2023
Rp 0,00

31 Desember 2022
Rp 0,00

Saldo dana cadangan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 0,00

4.2.3. ASET LAINNYA

31 Desember 2023
Rp.223.339.000,00

31 Desember 2022
Rp.202.839.000,00

Saldo Aset Lain - Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 223.339.000,00 dan sebesar Rp.202.839.000,00

4.2.4. KEWAJIBAN

31 Desember 2023
Rp.0,00

31 Desember 2022
Rp.0,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

4.2.4.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

31 Desember 2023
Rp.0,00

31 Desember 2022
Rp.0,00

Saldo Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00.



4.2.4.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

31 Desember 2023

Rp 0,00

31 Desember 2022

Rp 0,00

Saldo Kewajiban jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.0,00

4.2.5 EKUITAS

31 Desember 2023

Rp.415.988.920,00

31 Desember 2022

RP. 461.378.400,00

Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.415.988.920,00 Dan Rp.461.378.400,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih suatu entitas yang adalah selisih antara aset dan kewajiban Berdasarkan basis AkruaI nilai ekuitas dihitung dari Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

4.2.6. PENDAPATAN LO

Per 31 Desember 2023

Rp.0,00

31 Desember 2022

Rp.0,00

Pendapatan Laporan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 hal ini dikarenakan Kantor Camat Witihamas bukan Merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Daerah.

4.3.4 . BEBAN LO

31 Desember 2023

Rp.1.559.155.065,00

31 Desember 2022

Rp.1.731.965.615,00

Beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.559.155.065,00 yang terdiri dari:



4.2.7.1 Beban Pegawai-LO

31 Desember 2023
Rp.1.188.115.755,00

31 Desember 2022
Rp.1.221.240.915,00

Realisasi Beban Pegawai- LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.188.115.755,00 naik sebesar Rp.1.221.240.915,00 atau (31,11)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.2.916.576.128,00. Beban Pegawai -LO dirinci sebagai berikut

4.2.7.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

31 Desember 2023
Rp. 989.476.313,00

31 Desember 2022
Rp. 1.012.423.595,00

Saldo Beban per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 989.476.313,00 dan Rp. 1.012.423.595,00, beban Gaji dan tunjangan ASN dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	989.476.313,00	1.012.423.595,00	- 22.947.282,00
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	770.601.804,00	778.208.700,00	-7.606.896,00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	73.304.940,00	84.029.792,00	- 10.724.852,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	74.940.000,00	76.020.000,00	-1.080.000,00
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	18.710.000,00	20.660.000,00	-1.950.000,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	50.259.480,00	53.228.700,00	-2.969.220,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	585.065,00	268.855,00	316.210,00
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	11.024,00	7.548,00	3.476,00

Tidak terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai-LO,



4.2.7.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp.171.639.442,00 **Rp. 185.417.320,00**

Saldo Beban Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.441.080.262,00 dan Rp.440.704.148,00, beban tambahan penghasilan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.13. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	171.639.442,00	185.417.320,00	-13.777.878,00	-8,03
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	68.655.760,00	78.112.494,00	-9.456.734,00	-13,77
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	600.840,00	-600.840,00	-100,00
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	102.983.682,00	106.703.986,00	-3.720.304,00	-3,61

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Beban Tambahan Penghasilan ASN tahun 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp 13.777.878,00 atau sebesar 8,03% dari Tahun 2022.

4.2.7.1.2 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 27.000.000,00 **Rp. 23.400.000,00**

Saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.27.000.000,00 dan Rp.23.400.000,00, beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat di rinci pada tabel sebagai berikut:



Tabel 4.14. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	27.000.000	23.400.000	3.600.000	13,33
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	27.000.000	23.400.000	3.600.000	13,33

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.600.000,00 atau sebesar 13.33 % dari tahun 2022

4.2.7.2 Beban Barang Dan Jasa

31 Desember 2023
Rp. 303.823.930,00

31 Desember 2022
Rp. 436.859.500,00

Realisasi Beban Barang Dan Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 303.823.930,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 436.859.500,00 Beban Barang dirinci sebagai berikut.

4.2.7.2.1 Beban Barang

31 Desember 2023
Rp. 85.726.540,00

31 Desember 2022
Rp. 102.035.760,00

Realisasi Beban Barang Tahun 2023 sebesar Rp. 85.726.540,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 102.035.760,00. Beban Barang dapat di rincikan pada tabel berikut:

Tabel 4.15. Beban Barang

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
8.1.02.01	Beban Barang	85.726.540,00	102.035.760,00	-16.309.220,00	-15,98
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	85.726.540,00	102.035.760,00	-16.309.220,00	-15,98



Tabel di atas Beban Barang tahun 2023 sebesar Rp. 85.726.540,00 mengalami penurunan sebesar Rp(16.309.220,00) atau sebesar (15,98) % dari tahun 2022 sebesar Rp 102.035.760,00.

4.2.7.2.2 Beban Jasa

31 Desember 2023
Rp. 135.412.890,00

31 Desember 2022
Rp. 207.088.740,00

Realisasi Beban Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 135.412.890,00 turun sebesar Rp (71.675,850,00) realisasi Beban Jasa tahun 2022 sebesar Rp. 207.088.740,00. Beban Jasa dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.16 Beban Jasa

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
8.1.02.02	Beban Jasa	135.412.890,00	207.088.740,00	-71.675.850	-34,61
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	135.412.890,00	207.088.740,00	-71.675.850	-34,61

Tabel di atas Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp.135.412.890,00 mengalami penurunan sebesar Rp(71.675,850,00) atau sebesar (34,61) % dari tahun 2022 sebesar Rp. 207.088.740,00

4.2.7.2.3 Beban Pemeliharaan

31 Desember 2023
Rp. 4.174.500,00

31 Desember 2022
Rp. 14.420.000,00

Realisasi Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.4.174.500,00 tahun 2022 sebesar Rp. 14.420.000,00 Beban Pemeliharaan dirinci pada tabel sebagai berikut:



Tabel 4.17 Beban Pemeliharaan

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	4.174.500,00	14.420.000,00	-10.245.500	-71,05
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	5.425.000,00	-5.425.000	-100
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.174.500,00	8.995.000,00	-4.820.500	-53,59

Dari tabel diatas terlihat Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp.4.174.500 mengalami Penurunan 10.245.500,00 atau sebesar 71,05% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp.14.420.000,00.

4.2.7.2.4 Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2023

Rp. 78.510.000,00

31 Desember 2022

Rp113.315.000,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 78.510.000,00 tahun 2022 sebesar Rp.113.315.000,00 BebanPerjalanan Dinas dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.18 Beban Perjalanan Dinas

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	78.510.000,00	113.315.000,00	-34.805.000	-30,72
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.510.000,00	113.315.000,00	-34.805.000	-30,72



Dari tabel diatas terlihat Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp. 78.510.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (34.805.000,00) atau sebesar (30,72)% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp.113.315.000,00

4.2.7.2.5 Beban Barang yang Diserahkan

31 Desember 2023

Rp.0.00

31 Desember 2022

Rp 0,00

Realisasi Beban Barang yang Diserahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp,0.00 tidak mengalami kenaikan/penurunan atau sebesar 0,00 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 0,00.

4.2.7.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2023

Rp. 67.215.380,00

31 Desember 2022

Rp 73.865.200,00

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 67.215.380,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 73.865.200,00.

4.2.8. SURPLUS /DEFISIT OPERASIONAL

31 Desember 2023

Rp (1.559.155.065,00)

31 Desember 2022

Rp (1.731.965.615,00)

Adalah jumlah surplus/deficit operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp.(1.559.155.065,00) dan 2022 Rp.(1.731.965.615,00).

4.2.9. SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

31 Desember 2023

Rp.00

31 Desember 2022

Rp.00

Adalah jumlah surplus/deficit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp.00 dan 2022 sebesar Rp.00



4.2.10. POS LUAR BIASA

31 Desember 2023
Rp.0,00

31 Desember 2022
Rp.0,00

Adalah jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 dan 2022 Rp.0,00 .

4.2.11. SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

31 Desember 2023
Rp.00

31 Desember 2022
Rp.00

Adalah jumlah surplus/defisit pos luar biasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp.00 dan 2022 Rp.00

4.2.12. SURPLUS/ DEFISIT LO

31 Desember 2023
Rp.(1.559.155.065,00)

31 Desember 2022
Rp (1.731.965.615,00)

Jumlah tersebut diatas diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

4.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.4.1. EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas akhir 31 Desember 2023 sebesar Rp.415,988,920,00 berasal dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/Defisit LO dan dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan /kesalahan yang mendasar.

1. Saldo Ekuitas Awal

Ekuitas awal disajikan berdasarkan saldo ekuitas akhir tahun 2022 dengan penjelasan sebagai berikut :

Ekuitas Awal Rp.461,378,400,00



4.4.2. SURPLUS/DEFISIT LO

Penyajian nominal surplus/defisit Lo berasal dari Laporan Operasional (LO) yang perhitungannya adalah Pendapatan dikurangi total beban. Surplus/deficit LO 31 Desember 2023 sebesar Rp.(1,559,155,065,00).

Penyajian nominal Dampak kumulatif perubahan / kesalahan yang mendasar per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00
- b. Selisih revaluasi asset sebesar Rp. 0,00
- c. Koreksi equitas sebesar RP. 0,00

Bertambah	0,00
Koreksi atas aset lain-lain kendaraan roda empat	0,00
Koreksi pindah aset – aset tetap lainnya ke aset tetap peralatan mesin	0,00
Koreksi saldo awal aset lain dari Ekstracampatable	0,00
Reklass ke aset lain dari Ekstracompatable	0,00

Sedangkan koreksi equitas berkurang sebesar

Berkurang	0,00
Koreksi saldo awal pindah antar entitas – aset tetap Tanah ke BAPPENDA	0,00
Koreksi saldo awal pindah antar entitas –aset tetap Peralatan Mesin ke BAPPENDA	0,00
Koreksi saldo awal aset tetap Peralatan Mesin dobel pencatatan atas kendaraan dinas beroda dua	0,00
Koreksi saldo awal pindah antar entitas – aset tetap Gedung ke BAPPENDA	0,00
Koreksi pindah aset tetap lainnya ke aset tetap Peralatan Mesin	0,00
Koreksi atas aset lain-lain kendaraan roda empat	0,00
Penghapusan aset lain-lain	0,00

4.5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD

Tidak ada koreksi atas Laporan Keuangan Kantor Camat Wihama Tahun Anggaran 2023.



BAB V

INFORMASI NON KEUANGAN

Organisasi Pemerintahan Daerah Kantor Camat Witihama merupakan salah satu OPD yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di Jl Trans Oringbele-Waiwuring Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.

Kantor Camat Witihama Tahun 2023 di pimpin oleh seorang Camat atas nama Laurensius Lebu Raya,SH sesuai dengan keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.12/63.G/04.664/PP.PNS/2017, Tanggal : 19 Januari 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dan Penjabat Pengawas a Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan sampai 31 Desember 2023, Kantor Camat Witihama didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga tenaga Non PNS yang terdidik dan terampil, sebagaimana terlihat pada table berikut:

Tabel 5.1. Data Pegawai berdasarkan eselonering

NO	ESELON	JENJANG PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	SI	S2	
1	II							
2	III					2		2
3	IV			2	1	3		6
4	Non Eselon		1	7				8
5	PPPK					1		1
	Jumlah ASN	0	1	9	1	6		17
1	Honorar			1	1			2
	Total Pegawai	0	1	10	2	6		19



Tabel 5.2. Data pegawai berdasarkan Golongan

<u>PNS</u>						
NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH ASN
		IV	III	II	I	
1	S2					
2	S1	2	3			5
3	D3/D2/D1		1			1
4	SLTA		8	1		9
5	SLTP			1		1
6	SD					0
7	<u>Jumlah PNS</u>	<u>2</u>	<u>12</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>16</u>
<u>PPPK</u>						
NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH ASN
		X	IX	VIII	VII	
1	S1		1			1
2	D3/D2/D1					0
3	SLTA					0
4	SLTP					0
5	SD					0
6	<u>Jumlah PPPK</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
7	Jumlah ASN	2	13	2	0	17

Tabel 5.3. Data Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Laki-laki		1	6		5		12
2	Perempuan			3	1	1		5
	Jumlah ASN	0	1	9	1	6		17
1	Honorer Laki-laki			1	1			1
2	Honorer Perempuan							0
	Honorer	0	0	1	1	0	0	2
	Total pegawai	0	1	10	2	6		19



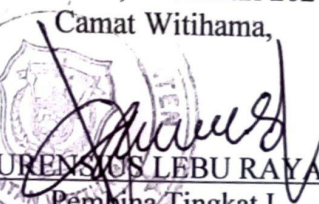
BAB VI

PENUTUP

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah, Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pembaharuan terhadap Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Kantor Camat Witihama dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur serta kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 pada Kantor Camat Witihama selanjutnya Informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan Kantor Camat Witihama Tahun 2023. Melalui Laporan Keuangan ini, diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Witihama, Januari 2024
Camat Witihama,

LAURENSIUS LEBU RAYA, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19660810 200012 1 003

LAMPIRAN